



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026**

# Kata Pengantar

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas izin-Nya sehingga Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara utuh sepanjang Tahun 2025 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “ **Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Cirebon Dalam Menghadapi Bencana**“

Untuk itulah semua kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada Tanggal : Februari 2026

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660420 199602 1 001

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR DATA DAN GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	5
1.3 Isu-Isu Strategis	5
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana- Prasarana dan Anggaran	5
1.5 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025 ex post Tahun 2024	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	24
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	30
3.3 Efisiensi Anggaran	38
3.4 Inovasi	40
3.5 Kerjasama Lintas Sektoral	41
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44
4.3 Langkah Perbaikan Kinerja	45
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# Daftar Tabel

---

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 2025-2026

Tabel II. 2 Strategis dan arah Kebijakan

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel III. 8 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel III. 9 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasarkan PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tabel III. 10 Kontribusi Sasaran BPBD Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

Tabel III. 11 Kontribusi Program BPBD Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Program Pemerintah Cirebon

Tabel III. 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

Tabel III. 13 Inventarisasi Lintas Sektor BPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

# Daftar Gambar

---

Gambar 1.1. Cascading Kinerja

Gambar 1.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPBD Kabupaten Cirebon

Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

Gambar 3.5. Hubungan Output Sub Kegiatan Dan Indikator SPM

Gambar 3.6. Hubungan Output Sub Kegiatan Dan Indikator Kinerja Sasaran dan Program

Gambar 3.7. Tabulasi Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran dan Program BPBD Tahun 2025

Gambar 3.8. Frekuensi Kejadian Bencana Alam Tahun 2025

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu – isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana- Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

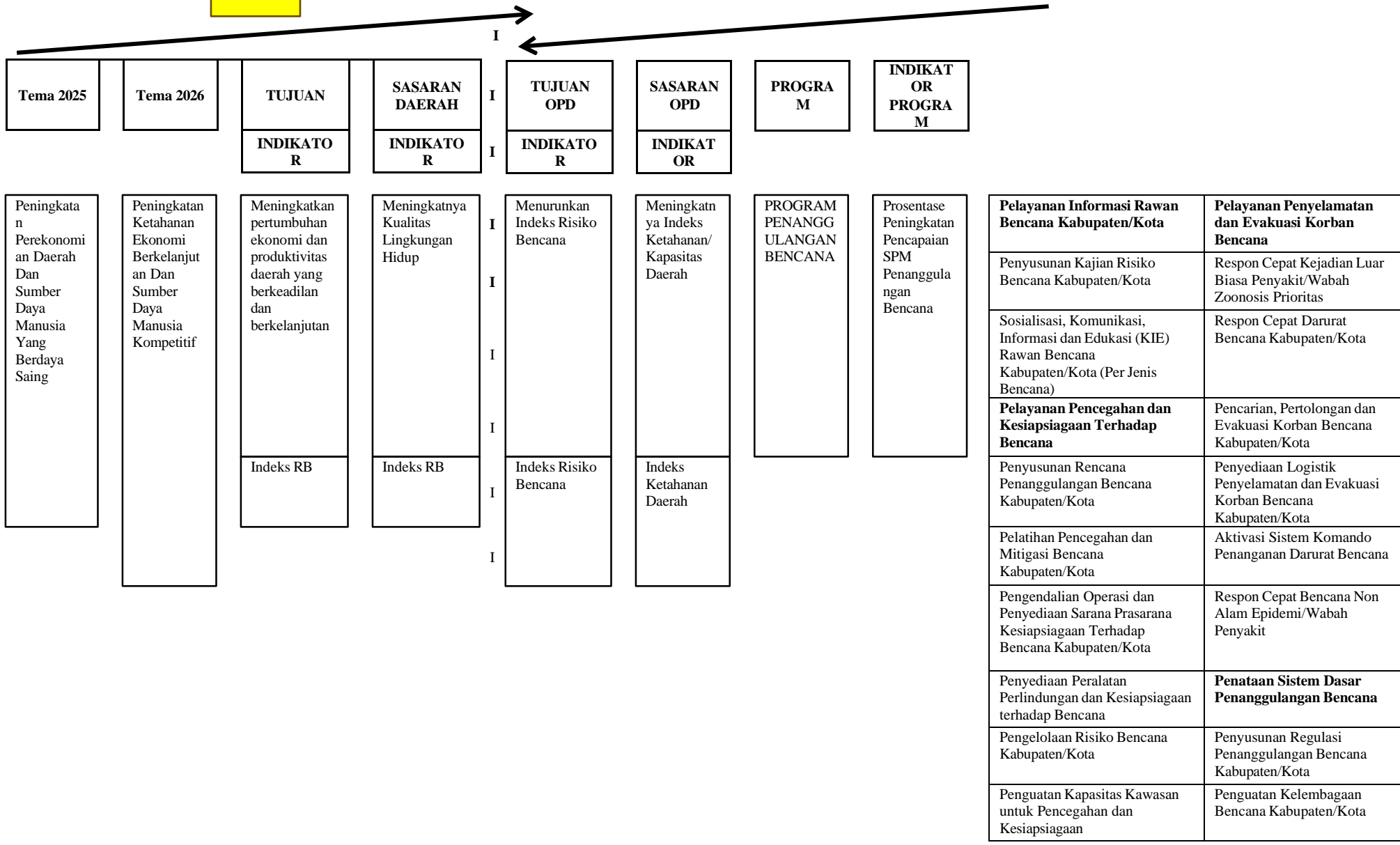
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan.



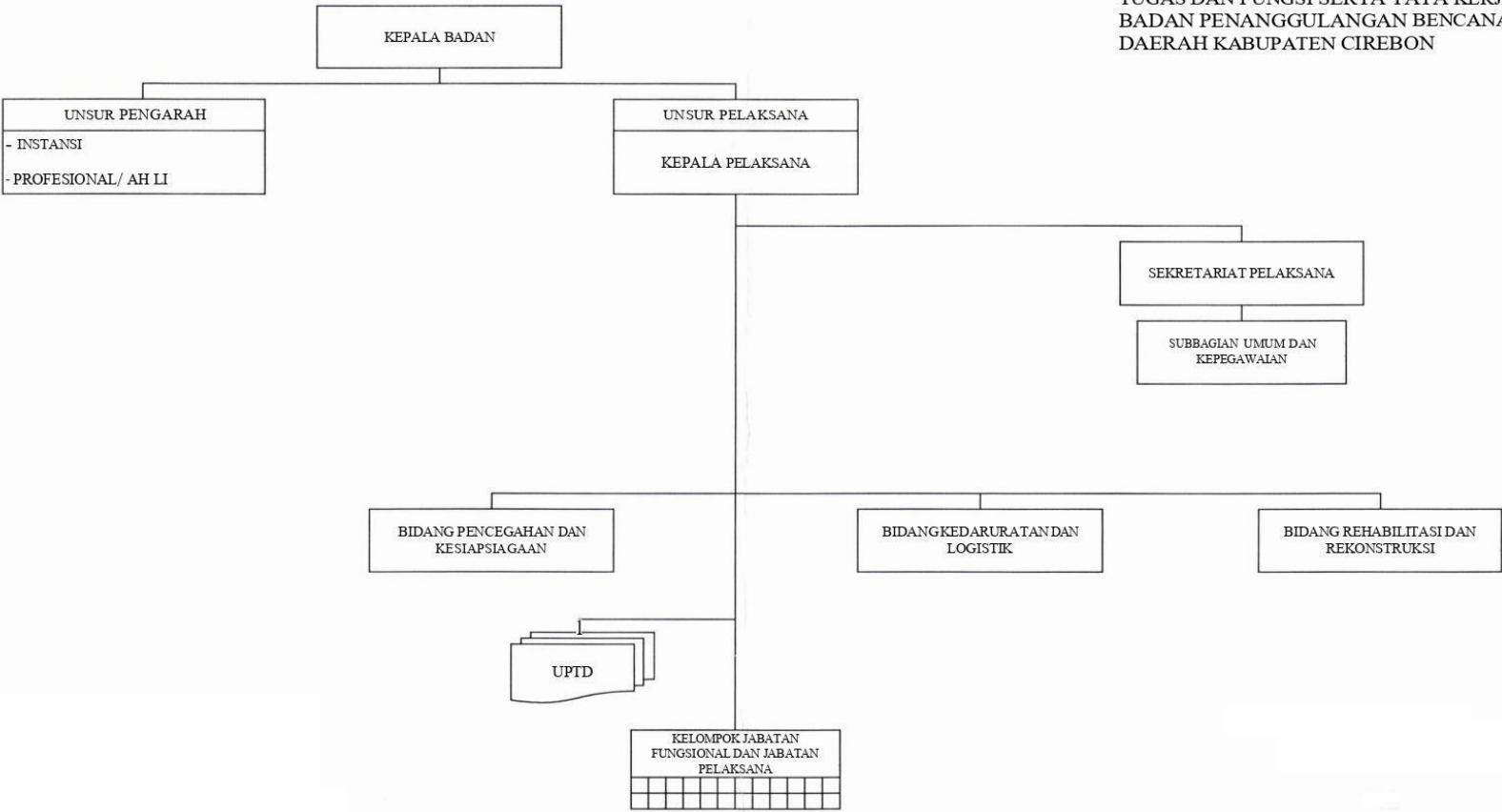
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

Sesuai dengan **Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023** tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, maka dapat dilihat bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon seperti gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 158 TAHUN 2023  
 TANGGAL: 14 DESEMBER 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN CIREBON



## 1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan **Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023** tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana ;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pealporan bidang penanggulangan bencana daerah;
7. Pelaksanaan adminnistrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3 Isu-isu Strategis

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;

## 1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

### 1.4.1. *Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan , Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin*

Jumlah personil yang ada per Desember 2025 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari 18 orang ASN dan 41 orang PPPK. Untuk rincian personil ASN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1. ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		L	P	S3	S2	S1	SMA	SMP
1.	VI/c	1			1			
2.	VI/b							
3.	VI/a	2	1	1	1	1		
4.	III/d	3	2		1	4		
5.	III/c	4				4		
6.	III/b							
7.	III/a	2					2	
8.	II/d	1					1	
9.	II/c	1					1	
10.	II/b	1					1	
11.	II/a							
12.	Golongan IX	7	7			14		
13.	Golongan V	7	2				9	
14.	PW	14	4			11	7	
	Jumlah	43	16	1	3	34	21	

**Tabel 1.2. Rekapitulasi Pemenuhan Anjab Tahun 2025**

Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon					
No	Jabatan	PNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	1	-	-	1
2.	Sekretaris	4	-	-	4
3.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	5	-	-	5
4.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	4	-	-	4
5.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	-	-	4
6.	Penata Layanan Operasional	-	10	11	21

7.	Pengadministrasi Perkantoran	-	6	-	6
8.	Operator Layanan Operasional	-	3	7	10
9.	Analisis Kebencanaan	-	1	-	1
10.	Penata Ahli Pertama	-	3	-	3
<b>JUMLAH</b>		18	23	18	59

Melihat tupoksi BPBD yang begitu banyak tidak berbanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cirebon. Sehingga dikarenakan kekurangan SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Cirebon, maka BPBD Kabupaten Cirebon belum mampu mengerjakan seluruh tupoksi dengan maksimal. Kredibilitas pegawai merupakan penunjang terbesar dalam keberhasilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dan faktor penunjang terlaksananya program kegiatan dengan maksimal.

Maka dibutuhkan penambahan pegawai BPBD Kabupaten Cirebon yang mempunyai kredibilitas dalam management penanggulangan bencana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai acuan dalam pemenuhan jumlah kebutuhan pegawai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan di BPBD Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 1.4. Kelengkapan Sarana dan Prasarana BPBD**

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jml	Satuan	Tahun Perolehan	Ket
1	Alat Angkutan Darat	Toyota Rush	1	Unit	2017	Mutasi
2		Carry Minibus	1	Unit	2017	Mutasi
3		Truk	1	Unit	2017	Pembelian
4		Pickup/ Kolbak	1	Unit	2018	Pembelian
5		Suzuki APV	1	Unit	2018	Mutasi
6		Mitsubishi Triton	1	Unit	2018	Hibah
7		Mitshubishi/Triton GLS (4X4) M/T	1	Unit	2020	Pembelian
8	Motor Trail		2	Unit	2018	Pembelian
9			2	Unit	2017	Hibah
10	Motor Supra 125cc		4	Unit	2018	Pembelian
11	Komputer	DELL	5	Unit	2017	Pembelian
12		Lenovo	5	Unit	2018	Pembelian

13	Printer	HP Deskjet	3	Unit	2017	Pembelian
14		Epson	5	Unit	2020	Pembelian
15			5	Unit	2018	Pembelian
16	Notebook	Dell	1	Unit	2017	Pembelian
17		Asus	6	Unit	2018	Pembelian
18	Infocus		1	Unit	2017	Pembelian
19	Layar Infocus		1	Unit	2017	Pembelian
20	Sound System	Krezt	1	Unit	2017	Pembelian
21			1	Unit	2018	Pembelian
22	Microfon		1	Unit	2017	Pembelian
23	Filling Kabinet		1	Unit	2017	Pembelian
24			5	Unit	2018	Pembelian
25	White board		1	Unit	2017	Pembelian
26			1	Unit	2018	Pembelian
27	Meja		2	Unit	2017	Mutasi
28	Meja Rapat		4	Unit	2017	Mutasi
29	Kursi Putar		8	Unit	2017	Mutasi
30	Portable Water Pump		1	Unit	2017	Mutasi
31	White Board		2	Unit	2017	Mutasi
32	Kursi Putar		2	Unit	2017	Mutasi
33	Sofa		1	Unit	2017	Mutasi
34	Finger Print		1	Unit	2017	Mutasi
35	Ac Split 1 PK		2	Unit	2017	Mutasi
36		Sharp	1	Unit	2019	Pembelian
37		Sharp	1	Unit	2020	Pembelian
38	Ac Split 1/2 PK		4	Unit	2018	Pembelian
39	Filling Besi / Metal	Brother	1	Unit	2017	Mutasi
40		Brother	5	Unit	2019	Pembelian
41	Lemari Kayu		4	Unit	2017	Mutasi
42	Kursi Tamu		1	Unit	2017	Mutasi
43	Kursi Lipat	Chitose	40	Unit	2017	Mutasi
44		Chitose	50	Unit	2019	Pembelian
45	Kipas Angin		2	Unit	2017	Mutasi
46	Kompas Gas		1	Unit	2017	Mutasi
47	Tabung Gas		1	Unit	2017	Mutasi
48	Lambang Garuda		1	Unit	2017	Mutasi
49	Gorden/ Vertical Blend		12	Unit	2017	Mutasi
50	Genset		1	Unit	2018	Pembelian
51			1	Unit	2018	Hibah
52	Perahu LCR		1	Unit	2018	Pembelian
53			2	Unit	2018	Hibah

54			5	Unit	2019	Pembelian
55	Chainsaw		2	Unit	2018	Pembelian
56			2	Unit	2018	Hibah
57	Tandu Evakuasi		2	Unit	2018	Pembelian
58	Velbeed		2	Unit	2018	Pembelian
59			3	Unit	2019	Pembelian
60	Power Suply		2	Unit	2018	Pembelian
61	Mesin penghancur Kertas	HSM Shredder S10/Paper shredder heavy duty 8 sheet	1	Unit	2018	Pembelian
62	Tabung PMK		4	Unit	2018	Pembelian
63	Tv	43 Inch	2	Unit	2018	Pembelian
64		Samsung 50 inch	2	Unit	2019	Pembelian
65	Pompa air 8 PK		1	Unit	2018	Pembelian
66	Repaeter		1	Unit	2018	Pembelian
67	Megaphone Sirine Toa		1	Unit	2018	Pembelian
68	Lemari	besi	5	Unit	2018	Pembelian
69	Filling Cabinet 4 laci		5	Unit	2018	Pembelian
70	Whiteboard magnetik kecil		1	Unit	2018	Pembelian
71	Mesin Kartu Absensi		1	Unit	2018	Pembelian
72	Camera		1	Unit	2018	Pembelian
73	Drone		1	Unit	2018	Pembelian
74	Camera Pocket		4	Unit	2018	Pembelian
75	Handycam		1	Unit	2018	Pembelian
76	Toa Portable		1	Unit	2018	Pembelian
77	Mesin Fax		1	Unit	2018	Pembelian
78	Rig Radio		2	Unit	2018	Pembelian
79	Menara Triangel		25	Meter	2018	Pembelian
80	Ht		10	Unit	2018	Pembelian
81	Mesin Fotocopy	Cannon JR 3045	1	Unit	2019	Pembelian
82	Mesin Pemetong Rumput	Stihl FR3002	2	Unit	2019	Pembelian
83	Komputer Server	DELL	1	Unit	2019	Pembelian
84	Tandu Evakuasi		4	Buah	2019	Pembelian
85	GPS	Garmen Montera	1	Unit	2019	Pembelian
86	Motor Boat/ Motor Tempel		1	Unit	2019	Pembelian
87		Yamaha	1	Unit	2019	Pembelian
88	Perahu Karet	Boogie	5	Buah	2019	Pembelian
89	Senter Search Light	SMD LED 30W	8	Buah	2019	Pembelian
90	Mobil tangki air	Mitsubishi	1	Unit	2019	Pembelian

91	Komputer PC Core i.3	LCD Samsung	1	Unit	2019	Pembelian
92	Laptop	Asus	1	Unit	2019	Pembelian
93	Kulkas/ Lemari Es	Sharp	1	Unit	2019	Pembelian
94	Drone	DJI Phantom4	1	Unit	2019	Pembelian
95	Handphone	Iphone7	1	Unit	2019	Pembelian
96		Iphone8	1	Unit	2020	Pembelian
97	Mesin Ketik Elektrik/ Digital	Brother	1	Unit	2020	Pembelian
98	Troly kapasitas 250 kg	Krisbow	2	Unit	2020	Pembelian
99	Vacum cleaner/ Mesin Penghisap	Krisbow	1	Unit	2020	Pembelian
100	Komputer PC core i5	DELL	5	Unit	2020	Pembelian
101	Scanner	Cannon	1	Unit	2020	Pembelian
102	LED 22" (Monitor)	Samsung	1	Unit	2020	Pembelian
103	Toilet Portable		4	Unit	2020	Pembelian
104	Radio HF SBB	Icom M710	1	Unit	2020	Pembelian
105	Thermometer Digital Infra Red		30	Unit	2020	Pembelian
106	Water Barrier		44	Unit	2020	Pembelian
107	Tenda Pleton		3	Buah	2020	Pembelian
108	CCTV		1	Unit	2019	Pembelian
109	Pompa Punggung Kebakaran Hutan		10	Buah	2021	Pembelian
110	Gergaji Chainsaw	Yamamaxpro	1	Buah	2021	Pembelian
111	Mesin Las	Mailtank	1	Unit	2021	Pembelian
112	Tangga Alumunium		1	Unit	2021	Pembelian
113	USB Port Hub		1	Unit	2021	Pembelian
114	Life Jacket (Pelampung)	Nearmount rescue	10	Buah	2021	Pembelian
115	Mobil Dapur Umum Lapangan		1	Buah	2023	Hibah
116	Pick up		1	Buah	2024	Pembelian
117	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)		1	Buah	2024	Pembelian
118	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) Bahan Viber		2	Buah	2024	Pembelian
119	Gergaji Chain Saw		5	Buah	2024	Pembelian
120	Dongkrak Hidrolik		1	Buah	2024	Pembelian
121	Tool Kit Box		1	Buah	2024	Pembelian
122	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5	Buah	2024	Pembelian
123	Pc Unit		2	Buah	2024	Pembelian

124	Printer (Peralatan Personal Komputer)		4	Buah	2024	Pembelian
125	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		2	Buah	2024	Pembelian
126	Tenda Pleton Kecil		1	Buah	2024	Pembelian
127	Tenda Pleton Besar		2	Buah	2024	Pembelian
128	Rice Cooker (Alat Dapur)		1	Buah	2024	Pembelian
129	PC Unit	Lenovo	2	Buah	2025	Pembelian
130	PC Unit	DELL	2	Buah	2025	Pembelian
131	Notebook	ASUS	2	Buah	2025	Pembelian
132	Printer	HP	1	Buah	2025	Pembelian
133	Kursi Rapat	Brother	2	Buah	2025	Pembelian
134	Kursi Rapat	Chitose	22	Buah	2025	Pembelian
135	Toilet Portable		3	Buah	2025	Pembelian
136	White board		2	Buah	2025	Pembelian

Kendaraan Dinas terdiri dari yakni 7 (tujuh) unit kendaraan operasional roda empat, 5 (lima) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif belum terpenuhi seperti ruang rapat, ruang arsip, ruang laktasi, ruang toilet, ruang mushola, ruang pengelola keuangan dan lain sebagainya.

**Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025**

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	Rp. xx,00	Rp. xx,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. xx,00	Rp. xx,00	
01	Pajak Daerah	Rp. xx,00	Rp. xx,00	
02	Retribusi Daerah	Rp. xx,00	Rp. xx,00	
		Rp. xx,00	Rp. xx,00	
	BELANJA DAERAH	Rp. 7.224.890.350	Rp. 6.554.413.783	90.72
	BELANJA OPERASI	Rp. 6.980.218.350	Rp. 6.316.504.983	90.49
01.	Belanja Pegawai	Rp. 4.079.523.750	Rp. 3.605.813.547	88.39
02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.900.694.600	Rp. 2.710.691.436	93.45
	BELANJA MODAL	Rp. 244.672.000	Rp. 273.908.800	97.24
02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 139.672.000	Rp. 138.364.000	99.06

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD pada Tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada tahun anggaran 2025 BPBD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.224.890.350,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.4.079.523.750,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.900.694.600,- dan belanja modal sebesar Rp.244.672.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

## 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

**Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024**

NO.	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	EVIDEN
<b>A. PERENCANAAN KINERJA</b>			
1.	Melengkapi pelaksanaan rapat internal perencanaan kinerja dengan notulen dan daftar hadir	Telah membuat notulen rapat dan daftar hadir	Evidence A point 1
<b>B. PENGUKURAN KINERJA</b>			
2.	Melengkapi dokumen penetapan IKU dengan pencermatan indikator kinerja (definisi operasional dan meta indicator)	Telah membuat dokumen penetapan IKU dengan pencermatan indikator kinerja (definisi operasional dan meta indicator)	Evidence B Point 2
3.	Melengkapi pelaksanaan rapat pembahasan capaian kinerja dengan notulen dan daftar hadir	Telah membuat notulen rapat dan daftar hadir	Evidence B Point 3
<b>C. PELAPORAN KINERJA</b>			
4.	Merevisi dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja 2024) dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dan target tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya selama periode Renstra (2029-2024)	Telah membuat dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja 2024) dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dan target tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya selama periode Renstra (2029-2024)	Evidence C Point 4
5.	Merevisi dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja) dengan menjelaskan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun lalu	Telah membuat dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja) dengan menjelaskan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun lalu	Evidence C Point 5
6.	Merevisi dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja) dengan menyebutkan Upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan setiap capaian kinerja sasaran strategis	Telah membuat dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja) dengan menyebutkan Upaya yang dilakukan untuk	Evidence C Point 6

		mengurangi hambatan setiap capaian kinerja sasaran strategis	
7.	Merevisi dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja) pada Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan menjelaskan sumber efisiensi	Telah membuat dokumen LKJIP Bab III (Capaian Kinerja) pada Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan menjelaskan sumber efisiensi	Evidence C Point 7
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
8.	Melengkapi pelaksanaan Rapat Internal Reviu LKJIP dengan Laporan/Berita Acara Evaluasi Internal terhadap LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Telah membuat laporan/Berita Acara Evaluasi Internal terhadap LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Evidence D Point 8
9.	Menyusun SOP Evaluasi Internal LKJIP	Telah membuat SOP Evaluasi Internal LKJIP	Evidence D Point 9

# BAB 2

## Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025*
3. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*
4. *Instrumen Pendukung*
5. *Capaian Kinerja OPD*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2025, BPBD menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029. Renstra BPBD merupakan manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPBD yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

#### **2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah untuk “Infrastruktur Wilayah Meningkatkan”. Hal ini dilatar belakangi dengan kondisi penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon dimana belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional dalam penanganan kebencanaan secara umum, sehingga perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat dan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko bencana sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan konsep terintegrasi yaitu mengurangi risiko bencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana. Untuk itu, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 menyebutkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan penanggulangan bencana adalah:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis BPBD Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Point	0.54	0.59	0.61	0.62	0.64
2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LKJIP BPBD	Point	74.00	72.25	76.40	78.35	79.60

Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah IKD diukur melalui **71 indikator yang terbagi dalam 7 prioritas**, dan setiap indikator memiliki beberapa *pertanyaan kunci* yang harus dipenuhi dengan *bukti verifikasi* seperti dokumen kebijakan, daftar hadir pelatihan, foto kegiatan, anggaran, dan lain-lain. Penilaian dilakukan melalui diskusi terfokus dan koordinasi multi-stakeholder



## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II. 2. Strategi dan Arah Kebijakan**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana</li> <li>2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan</li> <li>3. Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana</li> <li>4. Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana</li> <li>5. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana</li> <li>6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana</li> <li>7. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</li> <li>2. Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana</li> </ol>

## 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
Belanja Daerah			7.224.890.350	6.554.413.783	670.476.567	90,72
Belanja Operasi			6.980.218.350	6.316.504.983	663.713.367	90,49
Belanja Modal			244.672.000	237.908.800	6.763.200	97,24
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.164.394.150	4.530.750.483	633.643.667	87,73

	<b>A.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>78.799.000</b>	<b>78.001.000</b>	<b>798.000</b>	<b>98,99</b>
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.831.600	68.033.600	798.000	<b>98,84</b>
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.916.700	5.916.700	-	<b>100,00</b>
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.700	4.050.700	-	<b>100,00</b>
	<b>B.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.163.657.850</b>	<b>3.689.643.647</b>	<b>474.014.203</b>	<b>88,62</b>
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.079.523.750	3.605.813.547	473.710.203	<b>88,39</b>
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.338.400	38.338.400	-	<b>100,00</b>
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	45.795.700	45.491.700	304.000	<b>99,34</b>
	<b>C.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>384.357.000</b>	<b>382.973.850</b>	<b>1.383.150</b>	<b>99,64</b>
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.550.400	10.550.400	-	<b>100,00</b>
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.401.600	139.093.600	1.308.000	<b>99,07</b>
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.104.800	9.098.500	6.300	<b>99,93</b>
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.502.100	6.488.600	13.500	<b>99,79</b>
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.996.300	15.995.900	400	<b>99,997</b>
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000	19.800.000	-	<b>100,00</b>
	13	Penyediaan Bahan/ Material	57.565.300	57.565.300	-	<b>100,00</b>
	14	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.005.000	13.005.000	-	<b>100,00</b>
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.431.500	111.376.550	54.950	99,95
	<b>D.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>107.755.200</b>	<b>100.544.800</b>	<b>7.210.400</b>	<b>93,31</b>
	16	Pengadaan Mebel	-	-	-	0,00
	17	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	107.755.200	100.544.800	7.210.400	93,31

	<b>E.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>263.172.000</b>	<b>117.801.566</b>	<b>145.370.434</b>	<b>44,76</b>
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.700.000	4.984.226	144.715.774	3,33
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.472.000	112.817.340	654.660	99,42
	<b>F.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>166.653.100</b>	<b>161.785.620</b>	<b>4.867.480</b>	<b>97,08</b>
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.923.100	134.055.620	4.867.480	96,50
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.730.000	27.730.000	-	100,00
Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	<b>01:02</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.060.496.200</b>	<b>2.023.663.300</b>	<b>36.832.900</b>	<b>98,21</b>
	<b>G.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>82.452.800</b>	<b>82.452.800</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	82.452.800	82.452.800	-	100,00
	<b>H.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.489.618.200</b>	<b>1.457.960.300</b>	<b>31.657.900</b>	<b>97,87</b>
	23	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	364.321.900	358.696.900	5.625.000	98,46
	24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	38.396.200	38.396.200	-	100,00
	25	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	69.473.200	68.073.200	1.400.000	97,98
	26	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	6.978.500	6.978.500	-	100,00
	27	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	74.898.600	74.898.000	600	100,00
	28	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	935.549.800	910.917.500	24.632.300	97,37
	<b>I.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>371.955.600</b>	<b>371.955.600</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	29	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	371.955.600	371.955.600	-	100,00
	<b>J.</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>16.469.600</b>	<b>111.294.600</b>	<b>5.175.000</b>	<b>95,56</b>

	30	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	61.877.700	61.127.700	750.000	<b>98,79</b>
	31	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	54.591.900	50.166.900	4.425.000	<b>91,89</b>
<b>Jumlah</b>			<b>7.224.890.350</b>	<b>6.554.413.783</b>	<b>670.476.567</b>	<b>90,72</b>

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun perjanjian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Cirebon sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Capaian Target Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Point	0,54	Triwulan I	0,54
					Triwulan II	0,54
					Triwulan III	0,54
					Triwulan IV	0,54
2.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LkjIP BPBD	Point	74	Triwulan I	74
					Triwulan II	74
					Triwulan III	74
					Triwulan IV	74

Secara umum, kedua sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 saling berkaitan. Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah mencerminkan peningkatan kapasitas substantif dalam penanggulangan bencana, sedangkan peningkatan nilai LKjIP menunjukkan penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi. Dengan sinergi antara peningkatan kinerja substantif dan administrasi, diharapkan BPBD mampu mewujudkan pelayanan kebencanaan yang profesional, responsif, dan akuntabel.

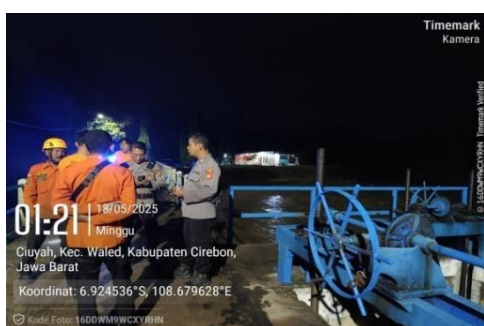
Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran perjanjian kinerja murni Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

NO.	Program RPD	Anggaran
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 12.101.871.250
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.188.449.700
Jumlah Anggaran		<b>Rp. 14.290.320.950</b>

Dari total anggaran sebesar **Rp14.290.320.950**, proporsi terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan porsi sekitar **84,69%**, sedangkan Program Penanggulangan Bencana memperoleh porsi sekitar **15,31%**.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk mendukung operasional kelembagaan, seperti belanja pegawai, administrasi perkantoran, perencanaan, pelaporan, dan dukungan manajemen lainnya. Sementara itu, anggaran yang secara langsung mendukung kegiatan teknis penanggulangan bencana relatif lebih kecil. Optimalisasi dan efisiensi anggaran menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Daerah dan nilai LKjIP BPBD secara berkelanjutan.



Pada Tahun 2025, BPBD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena mengikuti perubahan Rencana Kerja dan reviu Renstra 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Point	0,54
2	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LKjIP BPBD	Point	74

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai potensi bahaya dan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam. Penurunan indeks ini menjadi sasaran penting dalam kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sasaran kinerja BPBD, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKD merupakan indikator outcome yang menggambarkan keberhasilan substantif pelaksanaan penanggulangan bencana, sedangkan peningkatan nilai LKjIP mencerminkan keberhasilan tata kelola dan akuntabilitas organisasi sesuai pedoman evaluasi dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan kapasitas teknis kebencanaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

NO.	Program RPD	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
1	2		3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 12.101.871.250	Rp. 5.164.394.150
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.188.449.700	Rp. 2.060.496.200
Jumlah Anggaran		<b>Rp. 14.290.320.950</b>	<b>Rp. 7.224.890.350</b>

**Penjelasan :**

Berdasarkan perbandingan antara anggaran murni sebesar **Rp 14.290.320.950** dan anggaran perubahan sebesar **Rp 7.224.890.350**, terjadi penurunan anggaran sebesar **Rp 7.065.430.600** atau **49,44%**. Penurunan ini disebabkan oleh adanya refocusing dan penyesuaian prioritas anggaran daerah.



6 Mar 2024 12:48:49  
Jalan Pegongan  
Cilengkrang  
Kecamatan Pasaleman  
Kabupaten Cirebon  
Jawa Barat



dusun 4 Nagrak Rt 2 Rw 8 ds. sedong Kidul  
6.88875, 108.61338, 59.0m  
03/03/2024 17:35:41

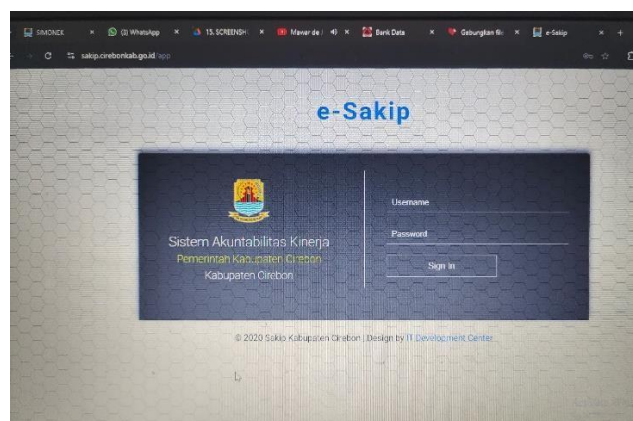


## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

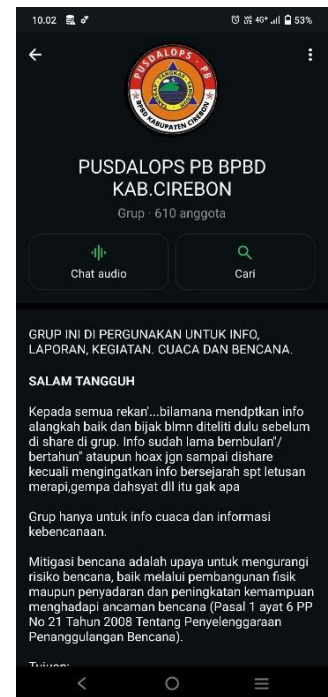
1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi E-Perencanaan yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, DPA. Terdapat aplikasi SIMONEK yang menggambarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan OPD.



2. E- SAKIP Reviu adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



3. Instrumen pendukung capaian kinerja di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Cirebon adalah Website dan Instagram Ssyang ada di BPBD, karena memuat banyak informasi terkait kebencanaan dan juga laporan kinerja yang dapat dilihat oleh siapa saja. Selain itu, ada juga aplikasi WhatsApp Group Pusdalops PB Kabupaten Cirebon yang memuat informasi kebencanaan maupun kondisi cuaca saat ini.



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

**Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Efisiensi Anggaran*
4. *Inovasi*

### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan bencana. Dalam waktu tahun 2025, Kabupaten Cirebon telah mengalami 57 kali kejadian bencana (Infografis BPBD Kabupaten Cirebon, 2025). Kejadian bencana tersebut meliputi bencana banjir, longsor dan cuaca ekstrem belum termasuk Wabah Penyakit yang sampai sekarang masih menjadi pandemi. Kejadian bencana cuaca ekstrim merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi. Kejadian bencana-bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak negatif, baik itu korban jiwa, harta benda maupun lingkungan/lahan yang rusak serta dampak psikologis bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Hubungan pentahelix dalam penanggulangan bencana digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1. Pentahelix Penanggulangan Bencana**

### PENDEKATAN PENTAHELIX



Empat aspek Penanggulangan Bencana (PB) dengan melibatkan elemen pentahelix ini kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan BPBD Kabupaten Cirebon dengan indikator kinerjanya:

Aspek PB	Indikator Sasaran BPBD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan Mitigasi</li> <li>• Kesiapsiagaan</li> <li>• Tanggap Darurat</li> <li>• Pemulihan</li> </ul>	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indikator sasaran dan Program yang merupakan implementasi dari aspek penanggulangan bencana ini kemudian dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025. Pelaksanaan penilaian Perjanjian Kinerja (PERKIN) kemudian dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (Penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

**Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sasaran Strategis dan Program)**

No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Target Akhir RPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD)	<p><b>Indikator :</b> Indeks Ketahanan Daerah</p> <p><b>Meta Indikator :</b> Peningkatan nilai IKD dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.</p>	Point	0.54	0.59	0.61	0.62	0.64	0,66	0	0	0	0	0,64
2.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	<p>Nilai LKJIP BPBD</p> <p><b>Meta Indikator :</b> Peningkatan nilai LKjIP menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.</p>	Point	74.00	72.25	76.40	78.35	79.60	74.00	0	0	0	0	79.60

Sumber : Indeks Ketahanan Daerah 2025

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1 Sasaran : Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghadapi ancaman bencana melalui penguatan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan/fisik. IKD mencerminkan kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Pada Tahun 2025, target IKD Kabupaten Cirebon ditetapkan sebesar 0,54 Point dengan realisasi sebesar 0,66 Point. Berdasarkan capaian tersebut, indikator IKD menunjukkan bahwa target (**Tercapai**) dengan persentase capaian sebesar 122,22%.

#### ➤ Faktor Pendukung

1. **Penguatan Aspek Pencegahan dan Kesiapsiagaan:** Peningkatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan. Simulasi dan pelatihan rutin kepada Masyarakat. Pembentukan desa tangguh bencana.
2. **Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor:** Sinergi OPD, TNI/Polri, relawan dan pemerintah desa, Forum pengurangan risiko bencana aktif.
3. **Optimalisasi Dokumen Perencanaan:** Tersedianya dokumen kajian risiko bencana. Rencana kontinjensi dan SOP penanganan bencana tersusun baik.
4. **Dukungan Sarana dan Prasarana:** Kesiapan peralatan dan logistic. Sistem informasi kebencanaan lebih tertata.

#### ➤ Faktor Penghambat

1. **Keterbatasan Anggaran:** Tidak semua program mitigasi dapat dilaksanakan optimal, Ketergantungan pada perubahan APBD.
2. **Keterbatasan SDM Teknis:** Jumlah personel terbatas dibanding luas wilayah rawan. Beban kerja meningkat saat musim bencana.
3. **Tingkat Kerawanan Wilayah:** Kabupaten Cirebon memiliki potensi banjir, longsor, kekeringan, dan angin kencang. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi kejadian.
4. **Partisipasi Masyarakat Belum Merata:** Tidak semua desa memiliki kapasitas kebencanaan yang sama.

#### ➤ Solusi

1. **Penguatan Kapasitas SDM:** Pelatihan teknis kebencanaan berkelanjutan., Sertifikasi personel BPBD.
2. **Penguatan Anggaran Berbasis Risiko:** Pengalokasian anggaran berbasis peta risiko. Integrasi program kebencanaan dalam RPJMD dan Renstra OPD.
3. **Digitalisasi Sistem Informasi:** Penguatan sistem peringatan dini, Integrasi data kebencanaan berbasis aplikasi.

- 4. Peningkatan Peran Desa:** Perluasan Desa Tangguh Bencana, Penguatan relawan berbasis masyarakat.

### 3.1.2 Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas

Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas melalui Nilai LKjIP BPBD merupakan ukuran keberhasilan BPBD Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Nilai LKjIP mencerminkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Pada Tahun 2025, target Nilai LKjIP BPBD Kabupaten Cirebon ditetapkan sebesar 74 Point dengan realisasi sebesar 74 Point.

#### ➤ Faktor Pendukung

- 1. Aspek Kebijakan:** Adanya regulasi SAKIP dan evaluasi dari Kementerian PANRB. Dukungan kebijakan kepala daerah terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Keselarasan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, PK, IKU).
- 2. Aspek SDM:** Tim penyusun LKjIP yang memahami perencanaan dan pengukuran kinerja. Adanya pelatihan penyusunan SAKIP dan pengelolaan data kinerja. Komitmen pimpinan dalam monitoring dan evaluasi.
- 3. Aspek Sistem & Data:** Tersedianya data capaian indikator yang valid dan terukur. Penggunaan aplikasi e-SAKIP / sistem pelaporan kinerja. Monitoring dan evaluasi berkala.
- 4. Aspek Anggaran:** Dukungan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Anggaran peningkatan kapasitas SDM.

#### ➤ Faktor Penghambat

- 1. Perencanaan Belum Selaras:** Indikator belum sepenuhnya SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Program dan kegiatan belum sepenuhnya mendukung IKU.
- 2. Kualitas Data Lemah:** Data belum terdokumentasi dengan baik. Pengukuran kinerja masih berbasis output, belum outcome.
- 3. SDM Terbatas:** Kurangnya pemahaman teknis penyusunan LKjIP. Beban kerja rangkap (tim perencana merangkap tugas lain).
- 4. Evaluasi Internal Belum Optimal:** Monitoring belum rutin. Rekomendasi evaluasi belum ditindaklanjuti secara konsisten

#### ➤ Solusi

- 1. Penguatan Perencanaan Kinerja:** Review dan penyelarasan IKU dengan RPJMD. Penyusunan indikator berbasis outcome (misalnya peningkatan Indeks Ketahanan Daerah, bukan hanya jumlah kegiatan).
- 2. Peningkatan Kapasitas SDM:** Bimtek SAKIP dan LKjIP. Studi tiru ke OPD

dengan nilai SAKIP tinggi. Pembentukan tim khusus pengelola kinerja.

3. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi:** Rapat evaluasi triwulan. Dashboard kinerja internal. Tindak lanjut rekomendasi evaluasi dari Inspektorat dan Kementerian PANRB.
4. **Digitalisasi dan Validasi Data:** Penguatan sistem e-SAKIP. Standarisasi format pelaporan dan dokumentasi bukti dukung.
5. **Komitmen Pimpinan:** Penandatanganan perjanjian kinerja secara berjenjang. Reward and punishment berbasis capaian kinerja.

Berdasarkan capaian tersebut, indikator Nilai LKjIP BPBD menunjukkan bahwa target **(Tercapai)** dengan persentase capaian sebesar 100%. yang dapat diukur dengan meta indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1.	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan nilai IKD dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.
2.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LKJIP BPBD	Peningkatan nilai LKjIP menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Kinerja sasaran meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD) diukur dengan menggunakan meta indikator yaitu Peningkatan nilai IKD dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai. Sedangkan Kinerja sasaran meningkatnya pelayanan kinerja dinas di ukur dengan menggunakan meta indikator.

### **3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran startegis diuraikan sebagai berikut :

#### **3.2.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman bencana melalui penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan/fisik.

Tolak ukur capaian kinerja IKD dinilai berdasarkan peningkatan skor indeks serta penguatan komponen pembentuknya.

#### **3.2.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan BPBD Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel,

efektif, dan berorientasi pada hasil melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun 2025 dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2024 (%)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,79	0,55	69.62	0,54	0,66	122,22	0,59	100 %

Sumber : BPBD Kabupaten Cirebon

Analisis keterbatasan Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Tercapai 0,66 point, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 122,22% (terlampau), dikarenakan adanya peningkatan kapasitas ketahanan daerah yang cukup signifikan dibandingkan dengan perencanaan awal.
  - b. Sasaran meningkatnya indeks ketahanan daerah adalah salah satu sasaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2025, sedangkan di Tahun 2024 sasaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu menurunnya indeks risiko bencana, sehingga dapat dibandingkan. Dimana untuk sasaran IRBI Tahun 2024 realisasinya 133,04 dan sasaran IKD Tahun 2025 realisasinya 0,66 point.
  - c. Capaian target indikator paada Tahun 2025 terhadap target Tahun 2026 100% (melampaui)

**Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2024 (%)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2.	Nilai LKJIP BPBD	-	-	-	74.00	74.00	100	72,25	100%

2. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Tercapai 74.00 point, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampau).
  - b. Pemahaman SDM terkait manajemen kinerja belum merata, Cascading kinerja belum sepenuhnya optimal, Indikator sebagian masih berorientasi output, Sistem pengelolaan data kinerja belum terintegrasi penuh.

Keberhasilan capaian sasaran meningkatnya indeks ketahanan daerah dan meningkatnya pelayanan kinerja dinas, tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM Perangkat Daerah	100 prosen	100 prosen	100
	<b>Kegiatan :</b> <b>A. Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
	<b>Kegiatan :</b> <b>B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</b>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	100

	<b>Kegiatan :</b> <b>C. Administrasi Umum</b> <b>Perangkat Daerah</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5400 dokumen	5400 dokumen	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 13. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 14. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100
	<b>Kegiatan :</b> <b>D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> 16. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	100
	<b>Kegiatan :</b>				

	<b>E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> 17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rekening	3 Rekening	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
	<b>Kegiatan :</b> <b>F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> 19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	100
	20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	40 unit	100
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		<b>Proesentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana</b>	<b>100 prosen</b>	<b>100 prosen</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan :</b> <b>G. Pelayanan Infromasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> 21. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang	100 orang	100
	<b>Kegiatan :</b> <b>H. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b>	Jumlah kawasan rawan bencana	15 Kawasan	15 Kawasan	100

	22. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	(per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana			
	<b>Sub Kegiatan :</b> 23. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	200 orang	200 orang	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 24. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1000 orang	1000 orang	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 25. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 26. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 kawasan	40 kawasan	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> 27. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	100
	<b>Kegiatan :</b> <b>I. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> 28. Penyediaan Logistik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	1500 orang	1500 orang	100

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	<b>Kegiatan :</b> <b>J. Penata Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>				
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>29. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 dokumen	3 dokumen	100
	<b>Sub Kegiatan :</b> <b>30. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	12 kegiatan	12 kegiatan	100

Sumber : LRA BPBD Kabupaten Cirebon

Capaian tersebut didukung dari :

**a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan standar pelayanan prima. Target capaian indikator ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 100% atau sekitar 100% dari target.

**b. Capaian Program Penanggulangan Bencana**

Indikator program penanggulangan bencana Proesentase Peningkatan Pencapaian SPM Penanggulangan Bencana. Target capaian indikator ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 100% atau sekitar 100% dari target.

**1. Faktor Pendukung Keberhasilan :**

a. Capaian indikator kinerja program 100%

Dari pembahasan diatas, telah diuraikan hubungan antara perhitungan indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan capaian indikator kinerja program. Untuk mencapai realisasi target indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana 100%, maka capaian target indikator kinerja program juga harus 100%

b. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkala

Pada Tahun 2025, kegiatan monitoring dan evaluasi regular dilaksanakan minimal 1 (satu)

bulan sekali, sedangkan untuk pembahasan- pembahasan khusus, rapat koordinasi dan pengendalian dilaksanakan sewaktu- waktu diperlukan. Selain peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi, perbaikan tatalaksana juga terus dilakukan peningkatan.

c. **Transparansi data dan informasi**

Pengelolaan data dan informasi BPBD pada Tahun 2025 juga mengalami peningkatan, dimana masing- masing bidang telah memiliki sumber data yang terkoneksi melalui website, dan media sosial lainnya seperti instagram, tiktok dan lain sebagainya atau kita bisa mendapatkan data dan informasi dari TIM unit data dan informasi penanggulangan bencana.

d. **Pelibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan**

Pelibatan lintas sektoral menjadi salah satu perhatian utama pada Tahun 2025 dan pengembangan pada tahun- tahun seterusnya. Pada tahun- tahun sebelumnya, kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BPBD masih bersifat non formal dan belum ada legalitas serta mekanisme yang memadai.

## **2. Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung keberhasilan beberapa hal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator kinerja masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah :

- a. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang
- b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tentang penanggulangan bencana
- c. Belum dilakukan kurasi aman bencana bagi bangunan sekolah secara masif
- d. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas- fasilitas umum dan belum menyebar di beberapa daerah rawan bencana

## **3. Upaya**

Untuk mengurangi hambatan dalam menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB), diperlukan berbagai upaya strategis yang bersifat lintas sektor. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

a. **Penguatan Kebijakan dan Regulasi**

**Penyusunan dan penegakan regulasi** tentang tata ruang berbasis risiko bencana.

**Integrasi pengurangan risiko bencana (PRB)** ke dalam kebijakan pembangunan di semua level pemerintahan.

**Penguatan koordinasi lintas sektor** dan antar pemerintah daerah.

b. **Peningkatan Kapasitas dan Edukasi**

**Pelatihan dan simulasi** bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.

**Pendidikan kebencanaan** sejak dini di sekolah-sekolah.

**Peningkatan kapasitas teknis** aparat daerah dalam manajemen risiko bencana.

c. **Perbaikan Infrastruktur dan Teknologi**

**Pembangunan infrastruktur tahan bencana** (bangunan tahan gempa, tanggul banjir, dsb).

**Pemanfaatan teknologi informasi** seperti sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan sistem informasi geospasial.

**Revitalisasi daerah rawan bencana**, seperti relokasi permukiman ke zona aman.

d. Pendanaan dan Dukungan Sumber Daya

**Peningkatan alokasi anggaran** untuk pengurangan risiko bencana di APBD dan APBN.

**Mendorong partisipasi sektor swasta** dalam pembiayaan kegiatan PRB.

**Optimalisasi Dana Desa** untuk kegiatan mitigasi berbasis komunitas.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi

**Pelibatan aktif masyarakat lokal** dalam perencanaan dan pelaksanaan program PRB.

**Penguatan kelembagaan komunitas** seperti Destana (Desa Tangguh Bencana).

**Kemitraan multi-pihak**, termasuk LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

f. Penguatan Sistem Informasi dan Data Risiko

**Peningkatan kualitas data dan informasi risiko** bencana yang mudah diakses dan digunakan.

**Pemantauan dan evaluasi berkala** terhadap efektivitas kebijakan PRB.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

#### Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda Kabupaten Cirebon dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon memiliki kontribusi pada pencapaian sasaran pemerintah daerah dan program pemerintah daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Kontribusi Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah**

No.	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	140,25	109,72	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,54	0,66
2.	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	74	74	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LKjIP BPBD	74	74

Sumber : LRA BPBD Kabupaten Cirebon

Penjelasan :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah melalui berbagai inisiatif penanggulangan bencana.

**Tabel Program Penanggulangan Bencana Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Rencana Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Sisa Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Penye rapan %</b>
<b>01:02</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.060.496.200</b>	<b>2.023.663.300</b>	<b>36.832.900</b>	<b>98,21</b>
<b>G.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>82.452.800</b>	<b>82.452.800</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	82.452.800	82.452.800	-	100
<b>H.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.489.618.200</b>	<b>1.457.960.300</b>	<b>31.657.900</b>	<b>97,87</b>
23	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	364.321.900	358.696.900	5.625.000	98,46
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	38.396.200	38.396.200	-	100
25	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	69.473.200	68.073.200	1.400.000	97,98
27	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	6.978.500	6.978.500	-	100,00
28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	74.898.600	74.898.000	600	100,00
29	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	935.549.800	910.917.500	24.632.300	97,37
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>371.955.600</b>	<b>371.955.600</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
30	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	371.955.600	371.955.600	-	100
<b>J.</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>116.469.600</b>	<b>111.294.600</b>	<b>5.175.000</b>	<b>95,56</b>
31	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	61.877.700	61.127.700	750.000	98,79
32	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	54.591.900	50.166.900	4.425.000	91,89

Salah satu program utama yang dijalankan adalah program penanggulangan bencana yang mempunyai beberapa kegiatan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari kegiatan tersebut bcbd mempunyai sub kegiatan yang mendukung kinerja yang lebih maju lagi diantaranya yaitu : pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), dan Satuan Pendidikan Aman Bencana

(SPAB). Selain itu, BPBD juga melakukan pendampingan kepada masyarakat di daerah rawan bencana, seperti di daerah Cirebon Timur dan Sekitarnya yang sering mengalami banjir. Upaya ini melibatkan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung untuk melakukan normalisasi aliran sungai sebagai langkah mitigasi. Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, BPBD Kabupaten Cirebon mendukung tercapainya sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, mengurangi dampak negatif bencana, dan memastikan



warga.



### 3.4 EFISIENSI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1.	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,54	0,66	122,22	2.060.496.200	2.023.663.300	98,21	41.366.900
2.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LKjJP BPBD	74	74	100	5.164.394.150	4.530.750.483	87,73	633.643.667

Sumber : LRA BPBD Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran BPBD Kabupaten Cirebon melampaui target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.7.224.890.350,-, terealisasi Rp. 6.554.413.783,- atau 90,72%

sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

### 3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2025 sebesar 90,72% dari total anggaran yang dialokasikan. realisasi anggaran untuk program/ kegiatan utama sebesar 87,73% dan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,21%. Sedangkan pencapaian fisik kegiatan adalah 100%, melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Cirebon pada Tahun 2025 sudah baik.

Capaian realisasi anggaran belanja pada BPBD Kabupaten Cirebon selama periode Tahun 2025 secara keseluruhan dan dibagi menjadi 2 program dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Serapan Anggaran Tahun 2025**

Program	Target		Realisasi		%
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	5.164.394.150	100	4.530.750.483	87,73
Program Penanggulangan Bencana	100	2.060.496.200	100	2.023.663.300	98,21

*Sumber : LRA BPBD Kabupaten Cirebon*

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2025 anggaran belanja pada BPBD Kabupaten Cirebon melalui mekanisme perhitungan efektivitas anggaran belanja di dapatkan hasil seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja**

Program	Target	Realisasi	%	Kriteria
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.164.394.150	4.530.750.483	87,73	Efisien
Program Penanggulangan	2.060.496.200	2.023.663.300	98,21	Efisien

Bencana				
---------	--	--	--	--

Sumber : LRA BPBD Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat efisiensi anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon berada pada kriteria **Efisien**.

### Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat perbandingan realisasi anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon bisa dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya**

Belanja/ Program	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase %
Belanja Daerah	7.435.209.860	6.937.939.579	93,31	7.224.890.350	6.554.413.783	90,72
Belanja Operasi	6.979.169.300	6.489.859.349	92,99	6.980.218.350	6.316.504.983	90,49
Belanja Modal	456.040.560	448.080.210	98,25	244.672.000	273.906.800	97,24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.146.611.360	4.721.025.959	91,37	5.164.394.150	4.530.750.483	87,73
Program Penanggulangan Bencana	2.288.598.500	2.216.913.620	96,87	2.060.496.200	2.023.663.300	98,21

Sumber : LRA BPBD Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pada Tahun 2024 yaitu belanja daerah sebesar Rp. 7.435.209.860,- sedangkan pada Tahun 2025 belanja daerah nya sebesar Rp. 7.224.890.350,- untuk realisasi nya di Tahun 2024 sebesar Rp. 6.937.939.579,- sedangkan pada Tahun 2025 realisasinya sebesar Rp. 6.554.413.783,- .

### 3.6 INOVASI

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan *Cloud* untuk sharing data sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien
- b. Pemanfaatan aplikasi layanan *Google* dan juga *website* untuk memberikan informasi terkait kinerja maupun informasi tentang kebencanaan yang telah di upload kedalam website BPBD.

- c. Pemanfaatan aplikasi *WhatsApp Pusdalops* untuk memberikan pelayanan informasi terkait kondisi cuaca terkini, informasi kejadian bencana secara lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien.

### 3.7 Reward and Punishment

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon telah menerima reward and punishment, berikut rincian penghargaan yang telah di dapat baik di tingkat Provinsi ataupun tingkat Nasional :

**Tabel Capaian Prestasi/ Penghargaan Perangkat Daerah**

No	Prestasi/ Penghargaan	Bidang Urusan
1	Tingkat Provinsi	
	Gubernur Jawa Barat : Daerah yang berhasil menurunkan nilai IRBI Tahun 2023 dari kategori tinggi menjadi sedang pada Tahun 2024	Kebencanaan 
2	Tingkat Nasional	
	CNN Indonesia Award 2024 Tema : Jawa Barat Menyala untuk Indonesia Maju	Kebencanaan 



# BAB 4

## Penutup

### Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Langkah Perbaikan Kinerja

### 4.1 Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah system dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2025. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai keberhasilan sasaran di tahun 2025 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran **baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

### 4.2 Saran

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka diperlukan:

1. Penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon itu sendiri, baik peningkatan pengkoordinasian APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

#### 4.3 Langkah Perbaikan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di daerahnya, untuk meningkatkan kinerja BPBD, beberapa langkah perbaikan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
- b. Menyediakan program peningkatan keterampilan dalam manajemen bencana
- c. Memperkuat system komunikasi darurat antar instansi
- d. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dan lembaga kemanusiaan

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : Februari 2025

-----  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660420 199602 1 001